

## Komisi Yudisial Perketat Seleksi Hakim untuk Cegah Praktik Korupsi

JAKARTA (IM) - Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia memperketat tahapan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM pada Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya praktik korupsi yang dilakukan hakim.

"Komisi Yudisial akan lebih memperketat lagi terutama pada seleksi rekam jejak hakim," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (4/10).

Komisi Yudisial juga secara terus menerus akan mencari dan menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali media massa tentang rekam jejak calon hakim agung.

Hal tersebut disampaikan Siti menanggapi Hakim Agung MA Sudrajat Dimiyati yang terjerat kasus korupsi dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu.

Siti menegaskan pengeatan seleksi itu bukan berarti selama ini tahapan seleksi tidak ketat. Namun, tahapan penjurian hakim agung dan hakim *ad hoc* HAM pada MA tahun 2022 akan jauh lebih diperketat menyusul kejadian

beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, papar dia, untuk memperluas proses rekam jejak, maka lembaga tersebut akan bekerja sama dengan berbagai instansi lain. Tujuannya menggali sebanyak mungkin informasi tentang sosok atau profil hakim yang akan dipilih. "Saya membina masyarakat agar memberikan masukan terutama tentang calon yang sudah lolos administrasi," ujar dia.

Terkait materi yang akan disiapkan atau diujikan oleh panitia seleksi bagi calon hakim agung yang lolos tahap administrasi, ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, KY telah mengumumkan nama-nama calon hakim agung yang lolos tahap administrasi. Untuk kamar pidana terdapat 43 orang yang dinyatakan berhak ikut seleksi kualitas pada 17 hingga 18 Oktober 2022.

Kemudian, sembilan orang di kamar perdata, 22 orang di kamar agama, kamar tata usaha negara terdapat enam calon yang lolos, dan terakhir kamar tata usaha negara khusus pajak panitia seleksi mengumumkan delapan calon yang lolos administrasi. ● osm

# 2 Polhukam

FOTO:ANT



## DPR RI Jadi Tuan Rumah P20, Presiden Jokowi Akan Buka Acara

Puan Maharani berharap parlemen di seluruh dunia dapat ikut berpartisipasi dalam membahas isu-isu global. Puan menyebut salah satu isu itu terkait ketahanan pangan hingga energi terbarukan.

JAKARTA (IM) - DPR RI akan menjadi tuan rumah dalam acara 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang digelar 5-7 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan hadir dan membuka acara P20 secara resmi pada Kamis (6/10).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan forum P20 akan digelar di Ruang Paripurna Nusantara II pada pukul 14.00 WIB. Sementara, pembukaan resminya akan digelar pada 6 Oktober oleh Presiden Jokowi.

"Penyelenggaraan P20 insyaallah akan dimulai besok pada pukul 14.00 dan akan dibuka resmi yaitu pada tanggal 6 Oktober yang akan datang oleh Presiden pada jam 13.00," kata Ketua DPR RI Puan Maharani kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10).

Sampai Selasa, tercatat 19 ketua parlemen sudah terdaftar untuk menghadiri forum P20. Sejumlah wakil ketua parlemen dari berbagai negara juga ikut menghadiri forum tersebut. "Saya harap pelaksanaan

P20 yang akan dihadiri sampai hari ini (Selasa), sudah terdaftar 19 ketua parlemen dan beberapa wakil ketua parlemen atau deputi yang akan mewakili untuk hadir pada pelaksanaan P20," ujar Puan.

Puan berharap parlemen di seluruh dunia dapat ikut berpartisipasi dalam membahas isu-isu global. Puan menyebut salah satu isu itu terkait ketahanan pangan hingga energi terbarukan. "Saya berharap itu nantinya akan membuat parlemen dunia bisa ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang sekarang ini menjadi satu isu yang sangat global. Tentu saja ikut pertama ketahanan pangan, juga kemudian energi terbarukan dan lain sebagainya," jelasnya.

"Tentu saja tidak hanya terfokus pada isu-isu yang ada saat ini, namun juga tentu saja kita bisa membicarakan hal-hal lain yang berkaitan, bagaimana

kemudian dunia bisa berpartisipasi dan gotong royong dalam membangun bangsa di dunia ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Puan juga berharap, DPR dapat berpartisipasi dalam mengimplementasikan semua program pemerintah yang nantinya akan melaksanakan G20 pada bulan November yang akan datang," ucap Puan. ● pan

### DUKA CITA ANGGOTA DEWAN ATAS TRAGEDI KANJURUHAN

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kanan) memasangkan pita hitam di lengan Anggota DPR Fraksi PPP Arsul Sani (tengah), Amirus Kara (kiri) sebelum rapat Paripurna DPR Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Sejumlah anggota Dewan mengenakan pita hitam di lengan yang bertuliskan DK atau Duka Kanjuruhan serta mengheningkan cipta atas tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur sebelum memulai rapat Paripurna.



### KUNJUNGAN AUSTRALIA DEFENCE FORCE CADETS KE KRI BIMA SUCI

Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-69 memberikan penjelasan tentang KRI Bima Suci-945 kepada Australia Defence Force (ADF) Cadets di pelabuhan Forst Hill Wharf Darwin, Darwin, Australia, Selasa (4/10). Kegiatan tersebut untuk memperkenalkan KRI Bima Suci-945 kepada 40 orang Australia Defence Force (ADF) Cadets.

### KPK Lakukan Pendekatan Persuasif Agar Lukas Enembe Kooperatif

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendekatan secara persuasif agar Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

"Kami masih terus melakukan pendekatan secara persuasif supaya yang bersangkutan itu kooperatif. Kami akan tetap menghargai kesehatan yang bersangkutan. Itu kami sampaikan, baik lewat penasihat hukumnya maupun lewat Kapolda dan Pangdam kemarin supaya dilakukan secara persuasif," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta seperti dilansir Antara.

Langkah persuasif tersebut, kata dia, guna mencegah risiko-risiko yang timbul, misalnya ada penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.

"Kami juga harus melakukan kalkulasi tentang risiko yang mungkin timbul kalau misalnya ada pengambilan secara paksa efek sesudahnya, ya, kami harus perhatikan. Hal itu tentu bukan persoalan sulit untuk mengambil paksa dengan mengerahkan segala kekuatan. Akan tetapi, itu tadi ada risiko yang tentu harus kami hitung di sana," kata dia.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Namun, dia tidak memenuhi panggilan dengan alasan masih sakit.

Lukas Enembe, kata Alex, turut menyertakan surat keterangan dokter maupun *medical record*. "Itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter, baik yang dokter pribadi maupun *medical record* dan catatan medis dari dokter yang di Singapura. Betul berdasarkan keterangan itu, *medical record* dan ada kewajiban atau catatan dokter bahwa yang bersangkutan itu harus segera diperiksa karena periode tertentu secara rutin. Menurut *medical record*, itu harus diperiksa," ungkapnya.

La mengatakan bahwa hal tersebut memang menjadi pertimbangan KPK. Namun, dia berharap Lukas Enembe dapat hadir terlebih dahulu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kalau Lukas Enembe dari Jayapura untuk diperiksa di Singapura, artinya akan lakukan penerbangan yang cukup jauh, atau lebih jauh daripada ketika yang bersangkutan dari Jayapura ke Jakarta.

"Apakah harus di Singapura yang bersangkutan diperiksa? Sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa kami periksa, kami lihat dahulu kondisi yang sebenarnya itu seperti apa, jantung, diabetes, atau penyakit yang lain," ucap Alex.

Alex pun menegaskan bahwa di Indonesia juga tidak kekurangan dokter-dokter kompeten, seperti dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

"Saya sampaikan di Indonesia juga tidak kurang dokter yang ahli di bidang itu, di Cipto Mangunkusumo kan itu berkumpulnya para dokter yang hebat, termasuk di RSPAD," ujarnya.

La melanjutkan, "Kami bawa ke dokter-dokter paling hebat di sini dan kami bantarkan kalau memang yang bersangkutan itu harus dirawat, kami bantarkan sampai dokter menyatakan sembuh dan siap dilakukan pemeriksaan. Itu sebetulnya yang kami tawarkan ke yang bersangkutan."

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka. ● han

## Perpanjangan PPKM Level 1 Seluruh Daerah hingga 7 November

JAKARTA (IM) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan seluruh daerah di Indonesia statusnya berada pada level 1 untuk perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali yang akan berlaku hingga 7 November 2022.

"Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat," tulis Instruksi Mendagri (Inmendagri) di kantornya di Jakarta, Selasa (4/10).

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM walaupun kondisi Covid-19 selama sebulan terakhir kondisinya terus membaik.

Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 45 Tahun 2022 untuk Jawa Bali, dan Instruksi Mendagri Nomor 46 Tahun 2022 untuk Luar Jawa Bali. Kedua Inmendagri tersebut

akan berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2022.

Pemberlakuan Inmendagri tersebut secara substansi tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan Inmendagri sebelumnya, dimana berdasarkan masukan dari para ahli seluruh daerah di Indonesia berstatus PPKM level 1.

Penyesuaian tidak jauh berbeda tersebut juga karena sebulan terakhir daerah-daerah di Indonesia telah berada dalam status level 1 PPKM sejak perpanjangan pada Instruksi Mendagri Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa Bali, dan Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk Luar Jawa Bali yang berlaku pada September lalu.

Dalam Inmendagri kali ini, Mendagri Tito Karnavian menekankan gubernur, bupati dan wali kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Kemudian apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Covid-19, maka menurut dia dilakukan rasion-

alisasi dan atau realokasi anggaran dari program kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.

Tata cara rasionalisasi dan atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Covid-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Terkait percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-dana desa, bupati wali kota diminta untuk melakukan percepatan evaluasi APBDDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDDesa pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah perencana pata KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya, kepala desa diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ● dot



### PENGUMUMAN KEPUTUSAN KOMDIS PSSI

Ketua Komite Disiplin (Komdis) PSSI Erwin Tobing (kiri) menunjukkan surat keputusan Komdis PSSI saat konferensi pers di Malang, Jawa Timur, Selasa (4/10). Komdis PSSI menjatuhkan sejumlah hukuman dan denda uang kepada klub Arema FC dan sanksi terhadap Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) serta koordinator keamanan (security officer) Arema FC terkait peristiwa di Stadion Kanjuruhan.

### Badan Otorita Siapkan 3 Kelengkapan IKN Agar Jadi Kota Layak Huni

JAKARTA (IM) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya sedang menyiapkan tiga kelengkapan untuk menjadikan IKN menjadi kota layak huni yaitu rancangan peraturan pemerintah, badan usaha milik otorita dan sosialisasi peluang investasi.

"Ada tiga hal yang kami persiapkan dalam rangka kita membangun IKN, Ibu Kota Nusantara yang tidak hanya layak huni tapi juga 'loveable', layak dicintai dan kami ingin agar di tahun 2024 nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh dan juga membuat kota itu menjadi kota yang layak huni," kata Bambang di kantor presiden Jakarta, Selasa dilansir Antara, Selasa (4/10).

Pertama adalah menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah untuk insentif bagi pelaku usaha yang akan berusaha di IKN. "Jadi ada beberapa insentif, fiskal dan non-fiskal yang memang kita rancang bersama-sama dengan kementerian investasi dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), beserta tim antar departemen dari (Kementerian) Keuangan dari Bappenas dan dari kementerian lainnya untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara," ungkap Bambang.

Tentunya, investasi tersebut, menurut Bambang akan bermanfaat buat semua pihak baik pemerintah, masyarakat yang bermukim di IKN maupun pelaku usaha itu sendiri. Kedua, Badan Otorita juga mempersiapkan badan usaha milik otorita.

"Jadi kemarin pada waktu melakukan sosialisasi tentang peluang investasi bersama-sama dengan KADIN, kami menerima banyak masukan, salah satu di antaranya adalah bagaimana kelincahan atau 'agility' dari otorita IKN ini dapat diwujudkan kalau kita memiliki satu badan usaha milik otorita yang nanti akan menangani aspek-aspek perusahaan," ujar Bambang.

Artinya, urusan kepengusahaan di dalam IKN nanti itu akan ditangani oleh badan usaha milik otorita yang akan bermitra maupun melakukan kesepakatan maupun strukturisasi ataupun 'financial engineering' bersama-sama dengan para investor dan pelaku

"Jadi memang bagaimana kemudian keikutsertaan DPR RI dalam program parliamentary summit ini saya harapkan kemudian kita bisa ikut membantu, berpartisipasi dalam implementasi semua program pemerintah yang nantinya akan melaksanakan G20 pada bulan November yang akan datang," ucap Puan. ● pan

usaha. "Dengan harapan agar ini dapat tercipta satu iklim usaha yang sangat baik dan yang berkelanjutan-nya. Jadi 'sustainability' dari investasinya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya," tutur Bambang.

Kelengkapan ketiga adalah sosialisasi peluang investasi yang dilakukan bersama KADIN. "Maka kami di Otorita IKN juga nanti bersama KADIN akan melaksanakan jajak pasar, 'market sounding' yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden," tambah Bambang.

Rencananya jajak pasar itu akan dilakukan pada pertengahan Oktober 2022 dengan mengundang para investor potensial. "Kita akan melakukan dialog satu forum yang saya kira ditunggu oleh banyak pihak untuk mengetahui seberapa jauh kita nanti sudah mempersiapkan apa-apa yang harus kita bangun, apa-apa yang harus kita upayakan agar iklim usaha, iklim investasi, dan yang paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan," jelas Bambang.

Tujuan akhirnya, menurut Bambang, adalah agar IKN menjadi kota yang "green", "smart", inklusif, "resilience" dan berkelanjutan.

IKN sendiri mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare yang berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap yaitu pada tahap I pada 2022-2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN; tahap II pada 2024-2029 dengan target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.

Tahap III yaitu pada 2030-2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan.

Tahap IV pada 2035-2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna serta tahap 5 pada 2040-2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil. ● mar

#### PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRI MEGAH BAHARI (Perseroan) berkedudukan di Tangerang Selatan tanggal 04 Oktober 2022 Nomor 01 dibuat di hadapan ANCELLA LAUSMANINGTYAS UTAMI, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, seluruh pemegang saham Perseroan memutuskan menyetujui:

1. Membubarkan dan melikuidasi Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 29 September 2022.
2. Menunjuk Nona CHRISTINA SANTOSO PUTRI sebagai Likuidator Perseroan.

Bagi para pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan dapat menghubungi Likuidator secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengumuman ini disertai dokumen asli dan lengkap ke alamat: Graha Raya Bintaro Jaya, Ruko Office Arcade 2, Jl. Boulevard Graha Raya Blok 2B No. 6 Tangerang Selatan 15324. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tangerang, 05 Oktober 2022 Likuidator Perseroan

#### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta tgl. 23 September 2022 No.04 dibuat dihadapan Vidhya Shah, SH, Notaris di Jakarta, telah selesai dilakukan pengambilalihan 90% saham dalam PT. Siko Nakamura Dwi Karya, berkedudukan di Kabupaten Serang oleh pihak ketiga.

Serang, 05 Oktober 2022 Direksi Perseroan